

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari modernisasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (Laporan tahunan DJP, 2007, hal.14). Setiana, dkk (2010) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak.

Upaya-upaya reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah bergulir sejak 2004. Namun, langkah-langkah perbaikan tersebut belum mampu mencegah kolusi aparat internal dan pengusaha. Salah satu kasus besar yang terjadi adalah kasus Gayus Tambunan. Kasus mafia pajak ini diawali dengan adanya laporan dari Susno Duadji yang mencurigai adanya penyimpangan pajak di tubuh Dirjen pajak dan juga di tubuh POLRI. Laporan ini juga kemudian diperkuat dengan adanya temuan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang menemukan adanya uang sebesar 25 miliar milik Gayus Tambunan di Bank Panin. Kemudian setelah dilaporkan ke kepolisian dan diusut oleh kepolisian maka ditetapkan bahwa gayus tambunan menjadi tersangka kasus penggelapan pajak di direktorat pajak (Kompasiana.com, 30 November 2010). Kasus Gayus Tambunan sedikit banyak telah menguak fakta bahwa reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pendekatan kesejahteraan

renumerisasi tidak efektif untuk menghapus korupsi di lingkungan Departemen Keuangan (Sundari 2010).

Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan direktorat jenderal pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Eksistensi modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 hal utama, yaitu (i) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi wajib pajak, serta pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (ii) penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada *full automation* (otomatisasi lengkap); (iii) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berdasarkan prinsip "*transparency, fairness, dan performance based*"; serta (iv) penerapan kode etik pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjalin terwujudnya pelaksanaan "*good governance*". (Laporan Tahunan DJP, 2007, hal.4).

Salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan produktivitas & integritas aparat pajak. Menurut Kementrian Keuangan, salah satu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh aparat pajak adalah nilai integritas. Petugas pajak, sebagai perpanjangan tangan pemerintah apalagi yang berkaitan langsung dengan bagian penerimaan pendapatan Negara, haruslah memiliki integritas yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Integritas Aparat Pajak (Studi Kasus KPP Watampone)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi struktur organisasi pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone?
2. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi proses bisnis pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP KPP Pratama Watampone?
3. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi manajemen sumber daya manusia pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP KPP Pratama Watampone?
4. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi good governance pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP KPP Pratama Watampone?
5. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi struktur organisasi, proses bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan good governance pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh antara modernisasi struktur organisasi pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone.
2. Mengetahui pengaruh antara modernisasi proses bisnis pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone.
3. Mengetahui pengaruh antara modernisasi sumberdaya manusia pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone.
4. Mengetahui pengaruh antara modernisasi good governance pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone.
5. Mengetahui pengaruh antara modernisasi struktur organisasi, proses bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan good governance pada penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap integritas aparat pajak KPP Pratama Watampone

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Akademisi
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan yang terkait dengan sistem modernisasi perpajakan bagi wajib pajaknya. Serta menambah wawasan penulis dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk melihat realita yang terjadi sebenarnya.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, digunakan sebagai referensi dalam pengkajian topik-topik yang sama dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja di kantor pelayanan pajak.